

## Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Paiz Nauval Adam<sup>1</sup> Lilis Suriani<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin  
Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia  
Email: [paiznauval@student.uir.ac.id](mailto:paiznauval@student.uir.ac.id) [lilissuriani@soc.uir.ac.id](mailto:lilissuriani@soc.uir.ac.id)

### Abstract

*This study aims to examine the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLTDD) program in Buluh Manis Village, Bathin Solapan Sub-district, Bengkalis Regency. The research employs a descriptive quantitative approach, with data collected through observation, questionnaires, interviews, and documentation. The implementation model refers to George C. Edward III's theory, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the implementation of the BLTDD program in Buluh Manis Village is generally moderately carried out. While the program runs according to established guidelines, its implementation has not yet reached full effectiveness. Challenges include delays in fund disbursement, limited public understanding of procedures, and lack of optimal coordination among implementers. In conclusion, although the program has brought positive impact to the community, its effectiveness still needs improvement. Strengthening coordination, increasing the capacity of implementers, and enhancing transparency and accountability are essential steps to achieve better program outcomes.*

**Keywords:** *BLTDD, Village Fund, Direct Assistance, Policy Implementation, Buluh Manis Village*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Model implementasi yang digunakan mengacu pada teori George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLTDD di Desa Buluh Manis secara umum tergolong cukup terlaksana. Setiap indikator telah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan, namun belum optimal. Masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program, serta koordinasi antar pelaksana yang belum maksimal. Kesimpulannya, meskipun BLTDD telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas program.

**Kata kunci:** *BLTDD, Dana Desa, Bantuan Langsung, Implementasi Kebijakan, Desa Buluh Manis*

## PENDAHULUAN

Negara pada hakikatnya merupakan organisasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing wilayah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, serta memperhatikan karakteristik lokal sesuai kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penataan administrasi hingga ke tingkat desa menjadi keharusan mengingat luasnya wilayah Indonesia, salah satunya melalui kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Kebijakan publik merupakan keputusan strategis yang diambil aktor berwenang untuk mengatur dinamika kehidupan masyarakat. Namun, kebijakan publik hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Implementasi menjadi tahap penting agar kebijakan benar-benar berdampak pada tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan, yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya. Pemerintah telah berupaya mengatasinya melalui berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

Program BLTDD bertujuan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin di desa sebagai bentuk intervensi langsung untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Namun, implementasi BLTDD di lapangan masih menemui berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian kriteria penerima manfaat, keterbatasan pagu anggaran, duplikasi penerima bantuan, hingga lemahnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan data di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, masih terdapat kesenjangan antara kriteria penerima resmi dengan kondisi faktual, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan keluhan masyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program BLTDD di Desa Buluh Manis serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta masukan praktis bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, adil, dan transparan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari *administration* (bahasa Inggris) dan *administratie* (bahasa Belanda) yang berarti pengelolaan atau tata usaha. Menurut Faried Ali (2011) dan Silalahi (2010), administrasi tidak hanya mencakup pencatatan, tetapi juga kerja sama terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Hardiyansyah (2017) membaginya menjadi tiga: sebagai proses atau kegiatan, sebagai tata usaha, dan sebagai penyelenggaraan pemerintahan publik yang

menekankan hubungan legislatif dan eksekutif. Sejalan dengan itu, Siagian (dalam Pasolong, 2014) menegaskan administrasi sebagai aktivitas kerja sama dengan pembagian peran yang jelas. Konsep ini relevan karena implementasi Program BLTDD di Desa Buluh Manis bergantung pada kemampuan perangkat desa dalam mengatur, mengurus, dan mengelola sumber daya serta prosedur agar tujuan kebijakan publik tercapai tepat sasaran.

## 2. Organisasi

Secara umum, organisasi dipahami sebagai sistem elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan (Winardi, 2011; Siswanto, 2013). Sunyanto (2013) menekankan fungsi organisasi sebagai wadah kerja sama individu dalam mengolah sumber daya. Robbins dan Griffin (dalam Sopiah, 2008; Suledan Saefullah, 2010) memandang organisasi sebagai unit sosial dengan struktur teratur untuk mendukung peran anggota secara berkelanjutan. Siagian menyoroti pentingnya pembagian peran, sedangkan Zulkifli (2014) menekankan sifat dinamis dan keterbukaan organisasi terhadap pengaruh eksternal. Dengan demikian, organisasi bukan hanya wadah aktivitas, tetapi juga proses kolaborasi yang menekankan koordinasi dan interaksi. Pemahaman ini relevan karena implementasi Program BLTDD di Desa Buluh Manis memerlukan kerja sama lintas unsur, struktur kewenangan jelas, dan interaksi efektif agar bantuan tepat sasaran.

## 3. Manajemen

Manajemen dipahami sebagai proses mengarahkan dan mengorganisir individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis (Terry & Rue, 2010; Winardi, 2010). Para ahli seperti Siswanto (2013), Suswanto dan Doni (2014), serta Hasibuan (2014) menekankan manajemen sebagai perpaduan ilmu dan seni dalam merencanakan, mengatur, memotivasi, dan mengawasi sumber daya agar efektif dan efisien. Prinsip dasarnya meliputi kerja sama, tujuan bersama, pembagian tugas, dan pengendalian (Hasibuan, 2014; Stoner dalam Zulkifli, 2014). Dengan demikian, administrasi, organisasi, dan manajemen saling berkaitan: administrasi mengatur kerja sama, organisasi menjadi wadahnya, dan manajemen mengarahkan jalannya proses. Dalam penelitian ini, efektivitas manajemen menjadi faktor penting agar implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Buluh Manis dapat berjalan tertib, efisien, dan tepat sasaran.

## 4. Kebijakan Publik

Agustino (2016) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dirancang secara sadar oleh pihak berwenang, bersifat simultan, nyata, dapat populer maupun tidak populer, serta selalu berlandaskan hukum. Nugroho (dalam Ali, 2015) mengklasifikasikan kebijakan publik menjadi tiga tingkat: makro, meso, dan mikro, sesuai cakupan dan pelaksanaannya. Dunn, Ripley, dan Dye (dalam Ali, 2007) menyoroti bahwa proses kebijakan publik meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, hingga evaluasi, yang saling berkesinambungan. Konsep ini relevan dengan fokus penelitian karena pelaksanaan Program BLT Dana Desa (BLTDD) memerlukan kebijakan yang jelas, terarah, berlandaskan kewenangan, serta melalui tahapan implementasi dan evaluasi agar tujuan bantuan tepat sasaran.

## 5. Implementasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2014), implementasi kebijakan adalah proses sistematis untuk memastikan keputusan publik dapat dijalankan sesuai tujuan yang telah

ditetapkan. Edward III menekankan empat faktor kunci yang saling terkait, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten memastikan kebijakan dipahami di semua tingkatan pelaksana. Sumber daya yang memadai, baik staf, informasi, kewenangan, maupun fasilitas, menjadi penunjang keberhasilan. Disposisi atau sikap pelaksana menentukan sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai arahan, sedangkan struktur birokrasi yang efektif mendukung koordinasi, SOP fleksibel, dan fragmentasi tugas yang tepat. Pendekatan Edward III ini relevan sebagai kerangka analisis karena secara praktis menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, seperti Program BLT Dana Desa (BLTDD), hanya dapat berhasil jika keempat variabel tersebut terintegrasi dan berjalan optimal di tingkat desa..

Dalam konteks lokal, implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) tidak terlepas dari tantangan koordinasi antar-perangkat desa, kejelasan komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana di lapangan, hingga prosedur birokrasi yang sering kali kaku. Oleh karena itu, pemilihan teori implementasi George C. Edward III dinilai tepat karena mampu memetakan faktor-faktor kunci seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara komprehensif. Keempat variabel ini memberikan kerangka analisis yang jelas untuk melihat sejauh mana kebijakan BLTDD dapat dijalankan efektif hingga ke tingkat desa.

## **METODE**

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif untuk menggambarkan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Data dikumpulkan dari dua kelompok, yaitu aparatur desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BLTDD dan masyarakat penerima manfaat. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling untuk aparatur desa dan accidental sampling untuk masyarakat penerima. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi desa, peraturan terkait, dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kuantitatif-deskriptif dan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel kunci yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan menurut teori George Edward iii, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tabel V. 1

Rekapitulasi Hasil Tanggapan Masyarakat terhadap Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Komunikasi	9 (30%)	14 (46,67%)	7 (23,33%)	30 (100%)
2	sumber Daya	10 (33,33%)	15 (50%)	5 (16,67%)	30 (100%)
3	Disposisi	10 (33,33%)	14 (46,67%)	6 (20%)	30 (100%)
4	Struktur Birokrasi	10 (33,33%)	13 (43,33%)	7 (23,34%)	30 (100%)
<b>Jumlah</b>		39	56	25	120
<b>Rata-rata</b>		10	14	6	30
<b>Persentase</b>		33,33%	46,67%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang penulis peroleh, rata-rata tanggapan responden terhadap implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berada dalam kategori 'Cukup Terlaksana'. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program telah dijalankan sesuai ketentuan kebijakan, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan peningkatan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan tepat sasaran.

Pada indikator komunikasi, pelaksanaan Program BLTDD dinilai sebagian besar masyarakat masih 'Cukup Terlaksana'. Informasi program memang telah disampaikan melalui berbagai forum seperti musyawarah desa, papan pengumuman, rapat perangkat desa, dan komunikasi informal, tetapi belum merata atau mudah dipahami semua KPM. Masih ada warga yang belum mengetahui jadwal penyaluran, mekanisme pengaduan, serta hak dan kewajiban penerima. Contohnya, beberapa papan pengumuman belum diperbarui sejak penetapan awal, dan grup WhatsApp RT/RW jarang digunakan. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperbanyak sosialisasi door to door, memperluas media informasi (spanduk, pamflet, grup WA), serta rutin memperbarui papan pengumuman di kantor desa.

Pada indikator Sumber Daya, dukungan SDM dan sarana prasarana dinilai cukup tetapi belum optimal. Aparatur desa, RT/RW, dan pendamping sudah berperan dalam pendataan hingga penyaluran, namun sebagian perangkat desa masih kurang terampil karena belum mendapat pelatihan rutin. Sarana seperti ruang rapat, papan informasi, dan perangkat administrasi tersedia, tetapi pemanfaatannya terbatas akibat minimnya perangkat IT dan koneksi internet yang sering bermasalah. Contohnya, verifikasi data ulang KPM masih dilakukan manual karena tidak ada laptop desa, sehingga pendataan lambat dan rawan kesalahan. Perbaikan dapat dilakukan dengan pelatihan rutin, pembekalan bagi RT/RW, serta peningkatan fasilitas IT dan jaringan internet.

Pada indikator Disposisi, pelaksana BLTDD di Desa Buluh Manis menunjukkan komitmen mendukung program, tetapi perlu ditingkatkan agar tidak sekadar formalitas. Aparatur hadir dalam musyawarah desa dan membuka posko pengaduan, namun evaluasi kendala masih kurang mendalam. Penetapan KPM sudah mengacu pada data P3KE, tetapi pembaruan data jarang dilakukan sehingga sering tidak sesuai kondisi riil, misalnya KPM pindah atau meninggal masih terdata. Perbaikan dapat dilakukan dengan evaluasi rutin, pengawasan berkelanjutan, dan penerapan reward and punishment agar sikap pelaksana tetap disiplin. Pada indikator disposisi atau sikap pelaksana, responden dari kedua kelompok memberikan tanggapan positif terhadap sikap kerja pelaksana yang dinilai konsisten, ramah, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas. Namun, di sisi lain, masih terdapat keluhan terkait kecepatan dan responsivitas dalam menangani kendala teknis atau permintaan informasi, yang menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem pelayanan ke depan.

Pada indikator Struktur Birokrasi, pelaksanaan BLTDD sudah memiliki SOP dan pembagian tugas antar perangkat desa, RT/RW, dan BPD, tetapi penerapannya masih kurang konsisten. Pembaruan data tidak rutin, pembagian tugas sering tidak tertulis, dan koordinasi monitoring pasca penyaluran belum terjadwal, sehingga potensi data tumpang tindih dan pengaduan terlambat masih terjadi. Perbaikan dapat dilakukan dengan penyempurnaan SOP, penulisan daftar tugas secara jelas, dan jadwal monitoring rutin. Contoh di lapangan, beberapa dusun belum memiliki daftar tugas RT/RW tertulis sehingga pendataan ulang KPM sering tidak sinkron dan memicu data ganda.

## **KESIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Penilaian program dilakukan berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut teori George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tanggapan dari masyarakat penerima manfaat yang dikombinasikan dengan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLTDD tergolong dalam kategori Cukup Terlaksana. Program telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sasaran. Beberapa elemen pelaksana seperti kesiapan sumber daya, kinerja aparat desa, dan keberadaan struktur birokrasi menunjukkan kinerja yang cukup memadai. Mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan program dan telah menerima bantuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan. Di antaranya adalah masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme program, terbatasnya kemampuan dan fasilitas pelaksana di desa, kurangnya efektivitas dalam penyampaian informasi, serta proses birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Selain itu, respons terhadap kendala teknis yang dihadapi masyarakat masih tergolong lambat dan belum menyeluruh.

Secara keseluruhan, implementasi Program BLTDD menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam membantu masyarakat terdampak secara ekonomi. Namun agar pelaksanaannya lebih optimal dan merata, perlu dilakukan perbaikan dalam hal komunikasi publik, peningkatan kapasitas pelaksana, penyederhanaan alur birokrasi, serta pengawasan yang berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Awang, M. (2010). *Pengantar Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Edward III, George C. (dalam Awang, 2010 & Agustino, 2014). *Implementing Public Policy*.
- George R. Terry & Leslie W. Rue. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunn, L.A. & Hogwood, B.W. (dalam Tahir, 2015). *Policy Analysis for the Real World*.
- Hardiyansyah. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2014). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil. (2008). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Korayati. (2005). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lester, J.P. & Stewart, J. (dalam Hardiyansyah, 2017). Public Policy: An Evolutionary Approach.
- Mazmanian, D.A. & Sabatier, P.A. (dalam Agustino, 2014). Implementation and Public Policy.
- Nugroho, Riant. (dalam Tahir, 2015). Public Policy.
- Parsons, Wayne. (2008). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ripley, R.B. & Franklin, G.A. (dalam Winarno, 2012). Policy Implementation and Bureaucracy.
- Silalahi, U. (2010). Administrasi Publik: Teori dan Konsep. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2013). Administrasi Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto. (2013). Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sopiah. (2008). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi.
- Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., & Gilbert, D.R. (dalam Zulkifli, 2014). Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suledan Saefullah. (2010). Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Sunyanto. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS.
- Suswanto & Doni. (2014). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafri. (2012). Administrasi Publik: Pendekatan Teori dan Konsep. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tahir, Moh. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Deepublish.
- Thoha, Miftah. (2012). Perilaku Organisasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Van Meter, D.S. & Van Horn, C.E. (dalam Agustino, 2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik.  
Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. (dalam Tahir, 2015). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi  
Kebijakan Negara.

Winardi. (2010). Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.

Winardi. (2011). Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zulkifli. (2014). Teori Manajemen dan Organisasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

(M.D, 2017)

Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau2017*Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*130-145

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan  
Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation  
Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan  
Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation  
Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional  
Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of  
Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and  
Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street  
Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu

- Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.

- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.

- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman,

- H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.

- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on*

- Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteran Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.

- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. PERSPEKTIF, 13(1), 164-173.

- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.

- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau

Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

### **Regulasi:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)